

**EVALUASI PROGRAM BEDAH RUMAH  
DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015-2016**

**Angela Rianza Putri**

*angelariazna@gmail.com*

**Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*In an effort to reduce poverty and inequality in villages in Pelalawan District, Pelalawan District government through the Social Service runs a home surgery program starting in 2008. Home surgery is a house or building occupied by poor people whose condition is very poor, built and rehabilitated according to available funds. The purpose of this study were (1) to describe the operation stage house in the subdistrict of Pangkalan Kuras, Pelalawan District. to find out the causes of the house surgery program in Pangkalan Kuras Subdistrict, Pelalawan Regency, it has not been successful. This study uses Hanif Nurcholis's evaluation theory which includes input, process, output, and outcome. This research is a qualitative research. this research was conducted in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The technique used to collect data in the study are (1) interviews, (2) documentation. The results of this study indicate that the first stage of the home surgery program was input, namely from the Social Service to socialize home surgery to the Sub-District Head, after that the Sub-District Head formed a group for the implementation and supervision of the home surgery program. The stages of the process were carried out by selecting recipients of the home surgery program, determining the determination of home surgery, and implementing a home surgery program. Output stages of the implementation of home surgery and the making of accountability reports for the implementation of the home surgery program. outcome sees whether the program has had a real impact on the community. The causes of the home surgery program have not been successful, namely: lack of funding sources, and lack of supporting basic materials, not precisely the target of the home surgery program, there are still many eligible people who have not been touched by housing assistance, supervision is not optimal from the Regional Government.*

***Keywords : Evaluation, Home Surgery Program***

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu pemerintah daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya memiliki tugas yang sama dengan daerah lain dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat diwilayahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah Kabupaten Pelalawan menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang harus diselesaikan salah satu permasalahan adalah masalah penanggulangan sosial. Dalam usaha mengurangi kemiskinan dan kesenjangan masyarakat di desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Sosial menjalankan Program Bedah Rumah dimulai sejak tahun 2008.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial, dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia dan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga dan keturunan-keturunan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. (Laporan Hasil Kegiatan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin se Kabupaten Pelalawan Pola Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015).

Untuk memperbaiki rumah tidak layak huni yang terdapat di masyarakat, maka Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan melalui bidang Rehabilitasi Sosial telah membuat program Kegiatan Bedah Rumah bagi masyarakat miskin se Kabupaten Pelalawan pola Pemberdayaan Masyarakat yang dananya bersumber dari APBD.

Program bedah rumah ini diselenggarakan mengacu pada

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 dan 34 UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan bedah rumah merupakan urusan wajib pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program bedah rumah menerbitkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan. Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 465/DISKESSOS-RS/RS/607/2015 tentang Penetapan Lokasi, Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) dan Penerima Bantuan Kegiatan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pelalawan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015.

Berdasarkan survei di lapangan, maka ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pembangunan bedah rumah pada tahun 2011 – 2016. Hal ini terjadi

- disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa setelah nama-namanya masuk ke dalam rencana penerima program rumah, kemudian diharuskan membuat proposal bantuan bedah rumah dengan melengkapi seluruh syarat yang ditetapkan seperti identitas diri, foto, alamat, gambar rumah, dan surat kepemilikan atas tanah serta surat keterangan atau rekomendasi dari desa/kelurahan, Program bedah rumah pada tahun 2011 – 2016 tidak dapat direalisasikan 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan.
2. Penerima bantuan bedah rumah tidak sesuai dengan kriteria penerima. Seharusnya program bedah rumah dibuat untuk masyarakat miskin, tapi yang dibedah rumahnya sebagian merupakan masyarakat yang digolongkan mampu. Kriteria penerima bantuan bedah rumah diantara lain meliputi:
    - a. Memiliki KTP Kabupaten Pelalawan atau surat keterangan domisili dari Desa/Kel/Camat.
    - b. Kepala Keluarga yang tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap atau mempunyai pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemandusiaan.
    - c. Masyarakat sangat miskin, mendekati miskin atau masyarakat miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
    - d. Sudah berkeluarga dengan melampirkan Kartu Keluarga.
    - e. Memiliki sertifikat tanah / SKGR atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Desa/Lurah yang ditandatangani batas-batas sepadannya.
    - f. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni diatas tanah sendiri.
    - g. Diutamakan belum pernah mendapatkan bantuan rumah dari Pemerintah atau sudah pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah yang diakibatkan bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.
    - h. Bersungguh-sungguh ikut membantu proses pelaksanaan bedah rumah sampai selesai sesuai kemampuan penerima.
    - i. Memberikan kuasa kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan bedah rumah bagi penerima yang telah ditetapkan. (Laporan Hasil Kegiatan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin se Kabupaten Pelalawan Pola Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015).
  3. Rumah yang dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa rumah yang dibangun pada tahun 2016 tidak seluruh dindingnya yang diplester hanya bagian depan dan kamar saja yang diplester, sedangkan sisi dinding lainnya tidak diplester. Selain itu ditemukan juga pembangunan rumah di Sorek Dua tidak diflapon seluruhnya, hanya kamar dan dicat hanya bagian depannya saja, dan tidak pembatas kamar terbuat dari triplek. Padahal dana yang dikeluarkan pada tahun 2015-2016 lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yakni Rp. 30.000.000,-/rumah, tahun 2011 – 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 22.000.000,-.
  - 4.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu “Apa penyebab program Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berhasil”

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan evaluasi program bedah rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab program bedah rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berhasil.

## KERANGKA TEORI

### 1. Kebijakan

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘*policy*’ yang dibedakan dari kata ‘kebijaksanaan’ (*wisdom*) maupun ‘kebajikan’ (*virtues*). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya/yang terkena kebijakan itu (Ealau dan Prewitt, 1973 dalam Suharto 2014:6). Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Titmuss, 1974 dalam Suharto, 2014:6)

Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan atau kepatuhan yang luas dari masyarakat (Winarno, 2012:21).

### 2. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo (2011: 112) mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Skema umum penilaian evaluasi adalah input, proses, output, dan outcome Nurcholis (2007: 146)

a. *Input* yaitu masukan perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:

- 1) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)
- 2) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)

b. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:

- 1) Tepat sasaran atau tidak
- 2) Tepat guna atau tidak
- 3) Efisien atau tidak

c. *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:

- 1) Tepat tidak sasaran yang dituju

- 2) Berapa besar sasaran yang tercover
  - 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
  - 4) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
- d. *Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:
- 1) Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran
  - 2) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
  - 3) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang di kumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang di hasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang di teliti (Suryanto, 2010:5).

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan

berdasarkan teori-teori yang ada (Moleong, 2004). Jenis penelitian ini deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran mengenai faktor apa yang mempengaruhi program Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum mencapai manfaat sesuai dengan tujuan. Peneliti mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan menggunakan metode :

- a. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian dan memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian (Marzuki, 2002:62). Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disediakan kepada para informan untuk menggali lebih dalam mengenai program bedah rumah yang telah dilaksanakan.
- b. Dokumentasi sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Marzuki, 2002:69). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan

aspek-aspek yang di teliti program bedah rumah.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan Evaluasi Program Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Dalam pelaksanaan bedah rumah dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan proses pengamatan secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan, apakah hambatan yang dihadapi terhadap pelaksanaan pembangunan bedah rumah tersebut. Jika terjadi masalah ataupun hambatan, maka secara dini disempurnakan sebagaimana perencanaan semula. Sedangkan Evaluasi menentukan proses dan menilai atau mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang kemajuan dari suatu kegiatan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan teori Nurcholis. Dimana teori ini ditetapkan dari awal proses sampai akhir program bedah rumah yang telah dilaksanakan dan penulis anggap teori ini sangat tepat untuk digunakan pada penelitian ini agar jelas apa permasalahan yang ditemukan

menjadi penyebab kurang berhasilnya program bedah rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Input**

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah program yang dibentuk, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber yang mana sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika personil yang melaksanakannya kurang mempunyai sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif.

#### **a. Sumber Daya Pendukung (Manusia, uang, sarana/prasarana)**

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika personil yang melaksanakannya kurang mempunyai sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengetahui keberadaan berbagai sumber-sumber yang terkait dengan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kabupaten Pelalawan. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, uang, sarana/prasarana.

Sumber daya manusia, uang, sarana/prasarana merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan bedah rumah yang termasuk dalam input pada tahapan sosialisasi yakni Dinas Sosial

melakukan sosialisasi ke tingkat Kecamatan yang kemudian bersama Camat membentuk organisasi masyarakat setempat dengan orang-orang yang dipilih dari rekomendasi kepala desa, kemudian organisasi masyarakat setempat melakukan penyeleksian penerima bantuan bedah rumah. Dengan demikian jelaslah bahwa Pemerintah telah menetapkan dan memilih anggota OMS, mengangkat dan mengeluarkan SK anggota OMS, dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota OMS sebagai pelaksana program bedah rumah di masing-masing desa/kelurahan.

*Pembentukan OMS dilakukan dengan mengundang warga yang memiliki kemampuan berorganisasi dan dianggap mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Pembentukan dimulai dari rapat dengan pemuka-pemuka masyarakat, lalu menunjukkan anggota OMS yang dipilih kemudian Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pembentukan OMS program bedah rumah tersebut.*  
**(Wawancara dengan Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras)**

Dengan demikian jelaslah bahwa OMS dibentuk ditingkat Desa dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah. Program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat sambutan baik dari masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Dimana dengan adanya bantuan bedah rumah ini akan mengurangi angka kemiskinan dan diharapkan penerima bantuan bedah rumah mampu hidup lebih layak lagi, karena tidak lagi memikirkan kondisi rumah dan hanya fokus mencari

penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian hasil observasi dilapangan masih dijumpai pembentukan organisasi masyarakat setempat (OMS) memang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi OMS diisi oleh ketua RW dan didukung oleh 2 orang masyarakat yang dianggap layak, namun pada faktanya ketua RW dan masyarakat tersebut kurang memahami secara teknis spesifikasi bangunan sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam membaca gambar rumah yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini terjadi karena, penetapan OMS hanya bisa dilakukan dikantor desa dan masyarakat yang menghadiri saja yang bisa dijadikan anggota OMS, selain itu SK yang dikeluarkan lambat sedangkan batas waktu penyelesaian pekerjaan terus berjalan yang menyebabkan lambatnya dana yang dicairkan pemerintah daerah.

#### **b. Bahan-Bahan Dasar Pendukung**

Dalam dana bantuan program bedah rumah, dana dicairkan ke masing-masing penerima bantuan bedah rumah melalui Tim Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk membeli bahan bangunan, upah tukang, dan sebagainya. Disinilah terdapat kendala dalam hal bangunan, sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial

*“Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program ini salah satunya adalah tentang harga bahan bangunan yang tentunya berbeda-beda disetiap desa/kelurahan, dan juga akses yang agak sulit di beberapa daerah sehingga menjadikan bahan bangunan yang diperoleh di daerah satu akan berbeda dengan daerah*

yang lainnya. **(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

## 2. Proses

Apakah program yang telah dilaksanakan tepat sasaran atau tidak akan menentukan keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan.

**Bagan 3.2 Tahapan Program Bedah Rumah Dimensi Proses**



Dilakukan penyeleksian penerima bedah rumah, menentukan penetapan bedah rumah dan melaksanakan program bedah rumah.

### a. Program Bedah Rumah Tepat Sasaran atau Tidak

Pemerintah telah menetapkan kriteria masyarakat penerima bantuan bedah rumah, melakukan seleksi terhadap masyarakat penerima bantuan bedah rumah, dan melakukan pemilihan dan menetapkan masyarakat penerima bantuan bedah rumah.

*Penyeleksian dilakukan mulai dari tingkat RT yang kemudian disampaikan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diserahkan, lalu diserahkan ke*

*Dinas Kesejahteraan Sosial untuk diseleksi bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat. (Wawancara dengan Pegawai Desa Sorek Dua)*

Penyelesaian dilakukan secara berjenjang untuk menghindari kesalahan sasaran penerima bantuan bedah rumah. Penyeleksian yang dilakukan berawal dari tingkat RT, berikutnya di tingkat Desa, lalu diserahkan ke Kecamatan untuk teruskan ke Dinas Sosial yang akan menyeleksi bersama-sama dengan Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT.

*Penyeleksian dilakukan secara berjenjang, sehingga diharapkan program ini tepat sasaran. Kami turun langsung melihat kondisi rumah warga yang diajukan dan menyeleksi kelayakannya, memang tidak seluruh yang didatangi tetapi gambaran kondisi ataupun keadaan rumah masyarakat tidak terlalu jauh berbeda untuk satu wilayah kecil yakni desa.*

**(Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras)**

Adanya proses penyeleksian secara berjenjang menjadikan program bedah rumah mampu mencapai kesasaran yang diharapkan. Tetapi pada faktanya ada penerima bantuan bedah rumah yang kondisinya cukup memungkinkan atau bisa dikatakan secara ekonomi mampu untuk membangun rumah yang layak, akan tetapi rumah yang ditematinya masih kurang baik (bukan permanen/semi permanen). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa indikator penyeleksian penerima bantuan kurang terlaksana.

Pelaksanaan program bedah rumah dinilai masih kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih

banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan tetapi tidak mendapat bantuan.

*“Banyak masyarakat yang tidak terima karena tidak mendapat bantuan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang ada sehingga jumlah bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial terbatas”.* (Wawancara dengan **OMS Kecamatan Pangkalan Kuras**)

#### **b. Program Bedah Rumah Tepat Guna atau Tidak**

Berdasarkan yang peneliti lihat dilapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan sudah tepat guna. Dimana rumah yang dibedah bisa ditempati dan lebih layak dari rumah sebelum dibedah, yakni adanya kamar tidur dan ruang tamu yang terpisah.

#### **c. Program Bedah Rumah Efisien atau Tidak**

Pelaksanaan bedah rumah ini dapat dikatakan efisien atau tidaknya dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses pelaksanaan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

*Pelaksanaan program bedah rumah yang telah dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu juklak maupun teknisnya, sehingga program bedah rumah lalu berjalan dengan baik. Walaupun didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan.* (Wawancara dengan **Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras**)

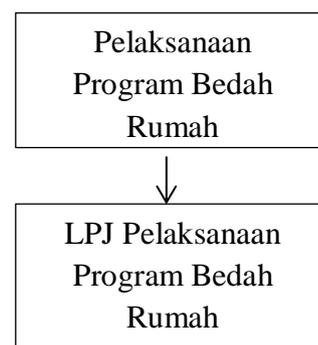
Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

pelaksanaan program bedah rumah khususnya di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras belum bisa dikatakan efisien, karena berbagai masalah yang terjadi menghambat dalam proses pelaksanaan sehingga memerlukan waktu yang lama tidak seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Output**

*Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

#### **Bagan 3.3 Tahapan Program Bedah Rumah Dimensi Ouput**



Dilakukan pelaksanaan bedah rumah, setelah bedah rumah dilaksanakan, maka Kelompok Masyarakat Setempat diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program bedah rumah.

#### **a. Tepat Tidaknya Sasaran Program Bedah Rumah yang Dituju**

Tepat atau tidaknya suatu sasaran kegiatan sangat tergantung pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dari program yang telah ditentukan. Dari hasil yang diperoleh dari penelitian di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan ini sudah diketahui bagaimana pelaksanaan bedah rumah.

*“Program bedah rumah ini menurut saya sudah tepat, karena program ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki rumah yang lebih layak”.*

**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

**b. Berapa Besar Sasaran Program Bedah Rumah yang Tercover**

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini seberapa besarnya sasaran dari pelaksanaan program ini sudah tercover atau tergambar bahwa pelaksanaan program ini masih ada kendala atau masih belum berjalan dengan lancar.

*“Pelaksanaan program bedah rumah di desa/ kelurahan hampir merata di seluruh kecamatan dengan jumlah rumah yang dibedah berbeda-beda. Namun belum semua masyarakat miskin yang mampu tercover dari program bedah rumah ini, sehingga perlu waktu yang panjang untuk menuntaskannya”.*

**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

**c. Seberapa Banyak Kelompok Sasaran Program Bedah Rumah Yang Tertangani**

Dari hasil yang diperoleh tentang berapa banyak kelompok sasaran yang tertangani dalam pelaksanaan program bedah rumah dapat dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni yang sudah mendapat bantuan dari program bedah rumah.

*“Mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2016 setidaknya sudah 596 unit rumah yang telah mendapat bantuan program bedah rumah, diharapkan kedepannya semakin banyak lagi sehingga dapat mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pelalawan”.*

**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

**d. Seberapa Banyak Kelompok Sasaran Yang Terlibat**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kelompok sasaran yang terlibat dalam pelaksanaan program bedah rumah sudah mencapai seluruh kecamatan dan hampir seluruh desa/kelurahan telah memperoleh bantuan bedah rumah secara bergilir dari tahun 2008-2016.

*“Masyarakat yang telah menerima bantuan program bedah rumah ini telah tercapai hampir di seluruh desa/kelurahan dengan jumlah bantuan yang bervariasi”.*

**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

**4. Outcome**

*Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan.

**a. Ada Atau Tidaknya Perubahan Pada Target/Sasaran Program Bedah Rumah**

Ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran dari pelaksanaan program bedah rumah harus sesuai dengan yang diharapkan. Namun disini target/sasaran

itu harus benar-benar berjalan tanpa ada hambatan, disini pelaksana harus bertanggung jawab dengan tugas yang harus diselesaikan tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang tidak diharapkan. Sebagaimana tanggapan yang diberikan keluarga Bapak Sulaiman/Endarwati selaku penerima bantuan program bedah rumah pada tahun 2015.

*“Menurut saya banyak perubahan yang terjadi setelah mendapat bantuan bedah rumah ini. Yang tadi nya rumah semi permanen, sekarang sudah permanen. Walaupun mungkin kurang di plafon dan di plester bagian dalamnya”.*

**(Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Desa Sorek Dua)**

#### **b. Seberapa Besar Perubahan Kelompok Pada Sasaran Program Bedah Rumah**

Dari hasil penelitian, seberapa besar perubahan terhadap sasaran yang dituju dapat terlihat dari hasil bantuan perbaikan rumah yang sudah dilaksanakan. Dari sini tampak bahwa terdapatnya perubahan yang cukup besar terhadap hasil dari pelaksanaan pembangunannya.

*“Masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah bisa menjalankan kehidupan yang setara dengan masyarakat lainnya dalam hal kondisi rumah yang sudah layak huni dan sehat bagi penghuninya”.*

**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)**

#### **c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai**

Pelaksanaan program bedah rumah dinilai masih kurang signifikan pada kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan tetapi tidak mendapat bantuan.

*“Banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapat bantuan. Padahal mereka sudah sering mengajukan. Hal ini dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial terbatas”.* **(Wawancara dengan OMS Kecamatan Pangkalan Kuras)**

#### **Faktor Penghambat Evaluasi Program Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Kurangnya Dana**

Pelaksanaan di desa/kelurahan yang mendapat bantuan hanya sedikit masyarakat yang mempunyai keahlian dalam melakukan pembangunan rumah, sehingga program bedah rumah yang diselenggarakan tidak bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang berada di suatu daerah. Hal ini disebabkan adanya ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengadakan bahan bangunan dan tukang, sehingga harus didatangkan dari luar daerah yang mendapat bantuan.

Dari wawancara peneliti dengan Ketua OMS/KMS diketahui bahwa:

*“Kecilnya dana yang dialokasikan untuk membedah satu rumah menjadi kendala untuk membuat rumah yang*

*berkualitas dan sehat. Dengan dana yang tersedia, bedah rumah dilakukan hanya membangun rumah dengan luas tipe 36 tanpa ada plester di dalam rumah dan plafon hanya dikamar saja". (Wawancara Dengan Ketua OMS Pangkalan Kuras)*

Kecilnya dana bantuan bedah rumah pada tahun 2015 - 2016 sebanyak Rp. 30.000.000,00 termasuk di dalamnya upah tukang dan membeli bahan bangunan, sehingga pembangunan tidak dapat tercapai dengan yang telah direncanakan.

## **2. Kurangnya Bahan Dasar Pendukung**

Bahan-bahan dasar pendukung dalam program bedah rumah di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak mendapat halangan, karena bahan bangunan untuk melaksanakan pembangunan masih mudah untuk diperoleh. Yang menjadi kendala tertelak pada distribusi bahan bangunan ke rumah-rumah yang menerima bantuan pembangunan bedah rumah sulit untuk dijangkau karena akses jalan yang kurang baik, sehingga banyak bahan bangunan yang harus di lansir menggunakan kendaraan roda dua.

*"Pendistribusian bahan bangunan ke rumah yang dibedah di Desa Sorek II ada yang sulit untuk dilewati kendaraan roda empat, sehingga harus dilansir dengan menggunakan sepeda motor. Pendistribusian ini menjadi tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan bedah rumah, karena adanya batas waktu untuk penyelesaian". (Wawancara*

**Dengan Ketua OMS Pangkalan Kuras)**

## **3. Belum Tepatnya Sasaran Program Bedah Rumah**

Pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Pelalawan belum bisa dikatakan efisien, karena berbagai masalah yang terjadi menghambat dalam proses pelaksanaan sehingga memerlukan waktu yang lama tidak seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenyataannya dilapangan masih terlihat kekurangan dari pelaksanaan bedah rumah tersebut, yakni bangunan yang dikerjakan asal jadi dan masa pengerjaannya cukup lama memakan waktu lebih dari 3 bulan.

Dari wawancara peneliti dengan Ketua OMS/KMS diketahui bahwa:

*"Proses bedah rumah memakan waktu yang lama, dikarenakan dan yang dikucurkan pemerintah daerah yakni Dinas Sosial secara bertahap, tahap I sebesar Rp. 15.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 15.000.000. Untuk pencairan harus melalui tahapan dengan memakan waktu hampir 2-3 bulan. Padahal dalam perencanaannya bedah rumah dikerjakan dalam waktu 1 bulan". (Wawancara Dengan Ketua OMS Pangkalan Kuras)*

Pelaksanaan program bedah rumah dinilai masih kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan tetapi tidak mendapat bantuan.

**Tabel 3.2 Keadaan Ekonomi dan Rumah Penerima Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras**

No.	Nama	Kondisi Rumah Sebelum Dibedah
1	Penerima 1	Non Permanen
2	Penerima 2	Non Permanen
3	Penerima 3	Semi Permanen
4	Penerima 4	Non Permanen
5	Penerima 5	Non Permanen
6	Penerima 6	Non Permanen
7	Penerima 7	Non Permanen
8	Penerima 8	Semi Permanen
9	Penerima 9	Non Permanen
10	Penerima 10	Non Permanen
11	Penerima 11	Non Permanen
12	Penerima 12	Non Permanen

Sumber: Olahan Penelitian, 2018.

#### 4. Belum Efisiennya Program Bedah Rumah

Pelaksanaan program bedah rumah belum berjalan dengan efisien, karena terbatasnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian program bedah rumah yang telah dilaksanakan di Desa Sorek Dua belum efisien untuk mengurangi angka kemiskinan, karena dari 34 kepala keluarga miskin yang kondisi rumahnya kurang layak huni, baru sebatas 8 yang menerima bantuan program bedah rumah.

*“Masih banyak masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan program bedah rumah di Kecamatan Pangkalan Kuras terutama di Sorek II. Sementara penerima bantuan bedah rumah setiap tahunnya terbatas sekitar 5-10 rumah perdesa”.*  
**(Wawancara Dengan Ketua OMS Pangkalan Kuras)**

#### 5. Output

Banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan yang belum mendapatkan bantuan program bedah rumah dan mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni dari segi kesehatan. Dimana masih ada sebagian yang berada dalam daerah yang sama yang memenuhi syarat dan kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan bahkan ada yang tidak di data oleh petugas

**Tabel 3.3 Jumlah Penerima Bedah Rumah Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016**

No	Tahun	Jumlah Rumah Yang Telah Dibedah		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2015	20	12	60,00
2	2016	20	12	60,00

Data yang ditampilkan pada tabel di atas terlihat bahwa di Kecamatan Pangkalan Kuras dari tahun 2015 – 2016 tidak pernah mencapai target dalam menerima bantuan program bedah rumah. Dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dengan Bapak Zulpen diketahui bahwa di Kecamatan Pangkalan Kuras sangat banyak rumah yang tidak layak huni, namun pemerintah mendapat kendala dari tanah atau kepemilikan tanah dari masyarakat miskin, sehingga target yang ditetapkan tidak dapat direalisasikan.

#### 6. Outcome

Pengawasan yang dilakukan Dinas terkait, tidak memberi dampak terhadap kekurangan bangunan yang dikerjakan yakni rumah yang dibangun terdiri dari dinding permanen tanpa plester, lantai di cor, kamar tidur, dan plafon kamar. Pembangunan tersebut kurang baik karena tidak diikutsertakan dengan kamar mandi yang sehat untuk setiap rumah.

Dari wawancara peneliti dengan Pegawai Kantor Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

“Kurangunya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi kendala untuk mendapatkan hasil rumah yang dibedah memiliki kualitas. Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada OMS setempat sebagai pelaksana tanpa ada pengawasan ketat, sehingga ada beberapa rumah yang dibedah tidak sesuai dengan RAB”. (Wawancara Dengan Pegawai Kantor Desa Sorek Dua)

## KESIMPULAN

1. Program bedah rumah agar tersedianya pelayanan kegiatan pembangunan bedah rumah bagi keluarga miskin, adanya kenyamanan bagi keluarga miskin untuk menempati rumahnya, terangkatnya harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin, timbulnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga terhadap pendidikan, serta meningkatkan kualitas kesehatan dilingkungan pemukiman keluarga miskin dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat miskin. Tahapan program bedah rumah sebagai berikut:

- 1) *input*, yaitu dari Dinas Sosial mensosialisasikan bedah rumah kepada Camat, setelah itu Camat membentuk kelompok penetapan Pelaksana dan Pengawas Program Bedah Rumah.
- 2) Tahapan proses, dilakukan penyeleksian penerima bedah rumah, menentukan penetapan

bedah rumah dan melaksanakan program bedah rumah.

- 3) Tahapan *Output*, pelaksanaan bedah rumah dan pembuatan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program bedah rumah.
  - 4) *Outcome*, yaitu melihat apakah program sudah berdampak nyata pada masyarakat.
2. Faktor-faktor penyebab Program Bedah Rumah di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan belum berhasil, ditemukan beberapa faktor yakni: kurangnya dana, kurangnya bahan dasar pendukung, belum tepatnya sasaran program bedah rumah, belum efisiennya program bedah rumah, masih banyak penerima manfaat belum tersentuh, dan pengawasan kurang maksimal dari pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, M.M. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Caps.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 465/DISKESSOS-RS/RS/607/2015 tentang Penetapan Lokasi, Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) dan Penerima Bantuan Kegiatan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pelalawan

Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015.

**Dokumen**

Laporan Hasil Kegiatan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin se Kabupaten Pelalawan Pola Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015).